



Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Studi Kasus: Puskesmas Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

Amalia Rahmadani Ilham¹⁾, Yupi Sasmita Dewi^{2)*}, Roby Hadi Putra³⁾,
Anwar Fuad Alamsyah Lubis⁴⁾

Politeknik Negeri Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

amalarahmadani@polmed.ac.id¹⁾
yupisasmita@polmed.ac.id^{2)*}
robbyhadiputra@polmed.ac.id³⁾
anwarfuad@polmed.ac.id⁴⁾

Abstrak

Patologi birokrasi merupakan fenomena yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam sistem birokrasi negara, yang tidak hanya terjadi pada tingkat pemerintahan tinggi, tetapi juga pada level pemerintahan yang lebih rendah. Kasus korupsi dana operasional di Puskesmas Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, mencerminkan bagaimana patologi birokrasi dapat terjadi pada sektor pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan kewenangan yang terjadi serta upaya untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patologi birokrasi di Puskesmas Rumbio Jaya berhubungan erat dengan tindakan melanggar norma hukum, seperti korupsi, penerimaan suap, ketidakjujuran, kleptokrasi, dan mark up anggaran. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan reformasi moral yang melibatkan penguatan integritas birokrat, pelatihan etika dan kode etik, peningkatan akuntabilitas, serta pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, budaya kerja yang positif perlu ditanamkan, dengan menekankan nilai-nilai kejujuran, profesionalisme, dan orientasi pada pelayanan publik.

Kata kunci: Integritas, Patologi Birokrasi, Pelayanan Publik, Reformasi Moral

Abstract

Bureaucratic pathology is a phenomenon that reveals deviations in the state bureaucracy system, occurring not only at higher levels of government but also at lower levels of administration. The case of operational fund corruption at the Rumbio Jaya Health Center in Kampar Regency illustrates how bureaucratic pathology can manifest in public services. This study aims to analyze the abuse of authority and propose solutions for addressing it. The research uses a descriptive qualitative approach with field observations and in-depth interviews. The findings show that bureaucratic pathology at the Rumbio Jaya Health Center is closely related to violations of legal norms, such as corruption, bribery, dishonesty, kleptocracy, and budget markup. To address these issues, moral reform is needed, involving strengthening bureaucratic integrity, ethics and code of conduct training, increased accountability, and tighter supervision. Additionally, a positive work culture must be instilled, emphasizing values such as honesty, professionalism, and a focus on public service.

Keyword: Integrity, Bureaucratic Pathology, Public Service, Moral Reform



PENDAHULUAN

Patologi birokrasi merupakan fenomena yang merusak sistem birokrasi negara dan menjadi salah satu penyakit yang menghambat efektivitas pemerintahan. Patologi birokrasi yang terjadi tidak hanya berimbas pada rendahnya kualitas pelayanan publik, tetapi juga dapat merusak citra pemerintahan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Birokrat, sebagai eksekutor kebijakan, seringkali terjerumus dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), yang dapat terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan dan kontrol dalam birokrasi. Meskipun demikian, hal ini dapat diminimalisir apabila ada upaya yang serius untuk memperbaiki dan memperkuat sistem birokrasi itu sendiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Patologi birokrasi bukan hanya terjadi pada tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga merambah hingga tingkat pemerintahan yang lebih rendah, seperti di Puskesmas Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Kepala Puskesmas Rumbio Jaya dan Bendahara terlibat dalam praktik penyelewengan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp372 juta (Riau, 2021). Kedua pejabat tersebut telah disidang dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus ini menunjukkan bahwa patologi birokrasi tidak hanya menjadi masalah struktural, tetapi juga mengarah pada pelanggaran hukum yang merugikan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas Rumbio Jaya dan bendahara, serta untuk memahami lebih jauh bagaimana patologi birokrasi dapat terjadi pada pelayanan publik di tingkat lokal. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Hasim (2023) dan Yoesoef Maolani et al. (2022), telah mengidentifikasi penyebab utama dari patologi birokrasi, seperti ketidakjelasan pembagian kewenangan, lemahnya pengawasan internal, serta kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Namun, kedua penelitian ini berfokus pada birokrasi di tingkat pemerintahan pusat.

Dalam konteks patologi birokrasi yang terjadi pada kementerian/Lembaga, dampak yang ditimbulkan tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Penulis tertarik untuk mengkaji patologi birokrasi ditingkat lokal ini karena sebagai seorang birokrat, upaya meningkatkan kualitas layanan menjadi tugas dan tanggung jawab utamanya, patologi birokrasi ditingkat lokal ini khususnya puskesmas, dampaknya terasa langsung oleh masyarakat penerima layanan kesehatan sekitar, serta dapat menurunkan kualitas layanan yang diberikan.

Patologi birokrasi yang terjadi ditingkat lokal ini juga menjadi hal yang krusial untuk diteliti, karena selain dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat penerima layanan kesehatan. Dana BOK yang seharusnya diperuntukkan untuk membiayai kegiatan operasional dan peningkatan pelayanan kesehatan di rumbio jaya, mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi rusak, dan negara rugi ratusan juta. Apabila hal ini tidak dikaji dan dicarikan solusi, maka penyakit-penyakit yang menggerogoti birokrasi akan terus berlarut-larut dan menyebabkan dampak negatif yang masif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara mendalam untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan kewenangan dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana patologi birokrasi dapat terjadi pada tingkat Puskesmas, serta memberikan rekomendasi terkait reformasi birokrasi yang dapat meningkatkan integritas dan efisiensi pelayanan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi, menggambarkan, dan memahami fenomena patologi birokrasi di Puskesmas

Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Pendekatan kualitatif dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap fenomena sosial yang sedang diteliti (Creswell, 2016). Metode kualitatif tidak hanya berfokus pada pengumpulan data faktual, tetapi juga berupaya mengungkapkan fenomena yang mendasari dan membentuk pandangan atau perilaku yang muncul dalam masyarakat, khususnya di lingkungan birokrasi pelayanan publik.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai praktik patologi birokrasi yang terjadi di Puskesmas Rumbio Jaya. Pendekatan studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki kasus spesifik dan menggali penyebab serta dampak dari praktik penyalahgunaan kewenangan yang terjadi dalam pengelolaan dana operasional kesehatan. Dengan desain ini, diharapkan dapat ditemukan temuan yang relevan yang memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang patologi birokrasi di tingkat lokal.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari hasil observasi dan wawancara dengan key informan yaitu beberapa pihak internal yang ada di puskesmas rumbio jaya kabupaten Kampar. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi dan dinamika yang terjadi di Puskesmas Rumbio Jaya, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Wawancara mendalam dilakukan dengan key informan untuk menggali informasi terkait praktik patologi birokrasi, termasuk alasan-alasan yang mendasari penyalahgunaan kewenangan serta hambatan dalam pelaksanaan aturan yang ada.

Teknik wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih personal dan mendalam dari para informan yang memiliki pengalaman langsung terkait kasus yang diteliti. Pemilihan key informan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu mereka yang memiliki pemahaman mendalam dan terlibat langsung dalam kasus yang sedang dianalisis. Sumber data sekunder adalah dari buku maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan patologi birokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Patologi birokrasi adalah fenomena yang sering kali terjadi dalam sistem birokrasi di banyak negara. Dalam konteks Indonesia, patologi birokrasi ini dapat dijelaskan sebagai penyimpangan atau perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etika, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma yang berlaku dalam administrasi publik. Sebagai konsep yang pertama kali diperkenalkan dalam studi administrasi publik, patologi birokrasi digunakan untuk menggambarkan penyakit atau disfungsi dalam birokrasi yang merugikan organisasi, masyarakat, dan negara. Siagian (1999) mengidentifikasi lima kategori patologi birokrasi yang dapat terjadi, yaitu (1) patologi yang timbul akibat persepsi dan gaya manajerial para pejabat, (2) patologi yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan keterampilan petugas, (3) patologi akibat pelanggaran terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan, (4) patologi yang tercermin dalam perilaku disfungsional birokrasi, dan (5) patologi yang timbul akibat situasi internal dalam instansi pemerintahan.

Penelitian ini menemukan bahwa patologi birokrasi yang terjadi di Puskesmas Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, termasuk dalam kategori ketiga, yaitu patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi yang melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus yang terjadi melibatkan Kepala Puskesmas dan Bendahara yang diduga melakukan korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), sebuah kasus yang menunjukkan penyalahgunaan kewenangan yang jelas. Korupsi ini terungkap setelah adanya laporan dari tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai dugaan penyelewengan anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan telah disalahgunakan. Berdasarkan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, negara mengalami kerugian hingga Rp370 juta akibat perbuatan tersebut.

Fenomena ini mengonfirmasi apa yang telah diungkapkan oleh (Siagian, 1999), bahwa salah satu bentuk patologi birokrasi adalah tindakan pelanggaran terhadap norma hukum dan perundang-undangan. Dalam hal ini, Kepala Puskesmas dan Bendahara terlibat dalam praktek korupsi dan mark-up anggaran yang merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan teori (Weber, 1947) mengenai birokrasi, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam memastikan bahwa birokrasi berfungsi dengan baik dan tidak terjerumus pada praktik penyalahgunaan wewenang.

Penyebab Patologi Birokrasi di Puskesmas Rumbio Jaya

Patologi birokrasi di Puskesmas Rumbio Jaya disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan temuan penelitian, penyebab utama patologi birokrasi di Puskesmas Rumbio Jaya adalah kurangnya pengawasan internal yang efektif dalam pengelolaan dana operasional kesehatan. Hasil wawancara dengan Ibu Iwi selaku petugas kesehatan menyampaikan bahwa: *"penyelewengan yang dilakukan oleh Kapus dan bendahara memang benar terjadi, saya tidak tahu persis alasan kenapa bisa dilakukan hal seperti itu, kami sebagai pegawai disini tidak tahu secara keseluruhan, malas juga bahas itu lagi"*.

Pernyataan dari ibu Iwi ini menunjukkan bahwa Kepala Puskesmas dan Bendahara memiliki kewenangan besar dalam mengelola anggaran, tapi tidak banyak pegawai puskesmas yang tahu dan peduli kemana dana tersebut dialokasikan. Beberapa diantaranya tidak sadar dengan praktik korupsi yang dilakukan oleh pimpinannya. Tidak ada sistem pengawasan yang cukup untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana secara rutin sehingga menciptakan celah bagi terjadinya penyalahgunaan dana operasional.

Senada dengan yang disampaikan oleh Dokter hes, selaku salah satu dokter yang bekerja di Puskesmas tersebut, menyebutkan bahwa: *"saya sudah resign dari puskesmas tersebut, pada saat BPK datang melakukan pemeriksaan terhadap kasus BOK itu, saya sudah tidak ditempat, dan tidak mengetahui informasi lebih lanjut terkait dinamika puskesmas lagi"*.

Wawancara juga dilakukan kepada Ibu Ir, selaku petugas kesehatan di puskesmas Rumbio Jaya, beliau menyampaikan bahwa: *"saya baru saja pensiun ketika kejadian tersebut, dan tidak bisa memberikan banyak informasi terkait hal ini, saya tidak punya banyak informasi yang bisa disampaikan"*.

Untuk memperkuat analisa, wawancara mendalam juga dilakukan kepada salah satu masyarakat penerima layanan kesehatan di puskesmas rumbio jaya, yaitu Pak Iben, pernyataan beliau terkait kasus ini yaitu: *"saya tidak tahu kalau ada kejadian ini, emangnya kapan ada pemeriksaan, patut layanan terasa kurang maksimal"*.

Pernyataan ini juga memberikan gambaran bahwa baik pihak internal, maupun eksternal atau masyarakat penerima layanan tidak melakukan monitoring terhadap apa yang dilakukan oleh para birokrat khususnya di puskesmas Rumbio Jaya tersebut.

Hal ini mencerminkan bahwa pengawasan yang tidak efektif dapat menciptakan kondisi di mana tindakan penyalahgunaan wewenang, seperti mark-up anggaran dan korupsi, dapat berlangsung tanpa ada mekanisme kontrol yang memadai. Gouldner (1954) dalam teorinya mengenai patologi birokrasi juga mengemukakan bahwa birokrasi yang tidak memiliki pengawasan yang cukup akan membuka peluang bagi aparatnya untuk melakukan tindakan kriminal seperti korupsi.

Selain itu, ada faktor lain yang menjadi pendorong terjadinya patologi birokrasi di puskesmas, seperti halnya pernyataan dari bapak Ahya: *"ndak tau juga persisnya, bisa jadi, tp kalau diliat dari penampilan biasa biasa saja"*

Gaya hidup hedon dan motivasi pribadi juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi birokrasi di Puskesmas Rumbio Jaya. Hal ini mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan pengalihan dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup pelaku tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika publik.

Sejalan dengan pendapat Fitriani & Tesniyadi (2023) bahwa korupsi merupakan salah satu dari dampak akibat gaya hidup hedonis.

Menurut Sumaryadi (2010), etika pemerintahan adalah etika yang mengacu pada kode etika profesional khusus untuk para pekerja instansi pemerintah. Etika pemerintahan mencakup aturan dan kode etik dan bertindak sesuai dengan nomor kelompok yang berbeda dalam institusi pemerintah. Dalam bekerja seorang pejabat pemerintahan seyogyanya mengikuti dan mematuhi peraturan dalam bekerja. Peraturan yang mengikat pegawai dalam bekerja sebagai pejabat pemerintahan bertujuan untuk menertibkan pegawai untuk menjaga citra baik dalam pemerintahan.

Lebih lanjut, motif simbiosis mutualisme antara pimpinan dan bawahan juga berperan sebagai faktor penyebab patologi birokrasi di Puskesmas Rumbio Jaya. Hubungan ini menciptakan iklim yang tidak sehat dalam birokrasi, di mana keputusan-keputusan diambil berdasarkan kepentingan pribadi dan bukan untuk kepentingan publik. Bin Abubakar (n.d.) mengemukakan bahwa korupsi terjadi karena adanya keserakahan dan egoisme dari para pemimpin yang menggunakan kekuasaan politik untuk keuntungan pribadi. Pemimpin kleptokrat menciptakan manipulasi sistem dan kebijakan seperti pajak, subsidi, tetapi kebijakan ini lebih berfokus pada keuntungan pribadi daripada kesejahteraan Masyarakat. Hal ini memperlihatkan bagaimana hal ini dapat menciptakan celah yang sangat besar untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Dampak Patologi Birokrasi terhadap Pelayanan Publik

Dampak dari patologi birokrasi yang terjadi di Puskesmas Rumbio Jaya tidak hanya merugikan negara dalam bentuk kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada kualitas pelayanan publik. Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat yang menggunakan layanan di Puskesmas tersebut, ditemukan bahwa masyarakat merasa kecewa dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Beberapa informan menyatakan bahwa layanan kesehatan di Puskesmas seringkali terlambat dan tidak didukung fasilitas yang memadai, meskipun anggaran untuk operasional seharusnya mencakup perbaikan fasilitas dan layanan yang ada di puskesmas rumbio jaya.

Hal ini menunjukkan bahwa patologi birokrasi yang terjadi tidak hanya merusak administrasi internal Puskesmas, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Fenomena ini memperlihatkan ketidakberdayaan sistem birokrasi dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap publik. Menurut Fukuyama (2014), ketidakmampuan birokrasi dalam menjalankan fungsinya dapat menyebabkan erosi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pelayanan public.

Reformasi Moral Birokrasi sebagai Solusi

Berdasarkan temuan penelitian ini, penting untuk melakukan reformasi birokrasi di tingkat Puskesmas untuk mengurangi patologi birokrasi yang terjadi. Salah satu langkah utama yang perlu diambil adalah penguatan sistem pengawasan baik dari internal maupun eksternal. Pengawasan internal yang lebih ketat, diikuti dengan audit yang lebih transparan dan rutin, dapat mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana yang diusulkan oleh Weber (1947) birokrasi yang baik harus memiliki struktur yang jelas, aturan yang ketat, serta sistem pengawasan yang transparan untuk menghindari patologi birokrasi.

Selain itu, perlu adanya reformasi moral dan etika dalam tubuh birokrasi. Penerapan pelatihan etika secara berkala kepada pejabat birokrasi di Puskesmas Rumbio Jaya dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya integritas dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya itu, penerapan prinsip-prinsip meritokrasi yang ketat dalam rekrutmen dan promosi birokrat juga akan mengurangi kemungkinan terjadinya nepotisme, yang juga merupakan bentuk patologi birokrasi. Karena pada kenyataannya, reformasi birokrasi tidak hanya terbatas pada struktur, proses atau prosedur saja tetapi juga reformasi moral dan sikap para birokrat. Tanpa ada kesadaran untuk mengurangi atau menghapus berbagai bentuk patologi birokrasi, maka

reformasi dalam rangka menciptakan birokrasi yang efisien, inovatif, responsif dan akuntabel hanya akan sebatas pernyataan belaka (Haryanto, 2007).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa patologi birokrasi yang terjadi di Puskesmas Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, merupakan bentuk dari penyalahgunaan kewenangan yang melanggar norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan penyalahgunaan ini termasuk praktik korupsi, penerimaan suap, ketidakjujuran, serta mark-up anggaran yang mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Penyelewengan ini terungkap berkat laporan dari tenaga kesehatan dan masyarakat setempat, yang merasa bahwa anggaran operasional mereka diselewengkan oleh Kepala Puskesmas dan Bendahara. Selain itu, patologi birokrasi ini juga disebabkan oleh faktor gaya hidup dan hubungan simbiosis mutualisme antara pimpinan dan bawahan, yang menciptakan lingkungan yang rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Tindakan korupsi ini berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik, dengan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas. Sebagai konsekuensi hukum, kedua pejabat yang terlibat telah dijatuhi hukuman penjara dan diwajibkan mengembalikan uang negara yang disalahgunakan. Berdasarkan temuan tersebut, upaya untuk mengatasi patologi birokrasi di Puskesmas Rumbio Jaya membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, termasuk reformasi birokrasi dan penguatan budaya integritas di kalangan pejabat dan staf.

Untuk mengatasi dan mencegah terjadinya patologi birokrasi serupa di masa depan, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan reformasi moral dan etika bagi para birokrat, dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme. Pelatihan etika dan kode etik secara rutin sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan sikap positif dalam menjalankan tugas-tugas administrasi.

Mekanisme spesifik yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kampar atau Dinas kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan etika secara berkelanjutan di Puskesmas dalam rangka meminimalisir patologi birokrasi kembali terjadi, yaitu:

Pertama: Tahap Perencanaan. Pada tahap ini pemerintah terkait perlu untuk melakukan identifikasi masalah, kasus etika yang sering terjadi di lingkungan puskesmas harus dianalisa terlebih dahulu, kemudian bentuk tim khusus yang terdiri dari kepala puskesmas, perwakilan dari setiap unit, dan tenaga kesehatan senior tugasnya untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pelatihan. Kemudian dibuat jadwal khusus dengan tidak mengganggu pekerjaan utama, serta menyusun kurikulum pelatihan yang mencakup prinsip-prinsip etika dasar (otonomi, kebaikan, tidak merugikan, keadilan), studi kasus, dan simulasi. Kurikulum juga harus disesuaikan dengan peran dan fungsi setiap tenaga kesehatan.

Kedua: Tahap Impelentasi. Pada tahap pelaksanaan, laksanakan dengan metode yang beragam, agar mendorong motivasi anggota dalam mengikuti kegiatan, seperti memanfaatkan platform online untuk mendapatkan module tika yang relevan. Selanjutnya yang bisa dilaksanakan pada tahap impelentasi yaitu melakukan diskusi rutin disetiap unit kerja dimentorin oleh pegawai senior yang kompeten untuk membimbing.

Ketiga: Tahap Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian. Pada tahap ini tim etika dapat melakukan observasi langsung untuk memastikan bahwa setiap tenaga kesehatan secara rutin memperbarui pengetahuan dan kompetensi etika mereka. Berdasarkan hasil evaluasi, perbarui dan perkuat kebijakan internal puskesmas terkait dengan etika, termasuk sanksi dan penghargaan. Perlu juga bahwa Kepala puskesmas harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan etika dengan berpartisipasi aktif.

Kedua, penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran harus menjadi prioritas. Hal ini dapat dicapai dengan penerapan sistem pengawasan yang ketat, baik dari dalam instansi Puskesmas maupun oleh pihak eksternal, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sistem pengawasan ini juga dapat diperkuat dengan



penerapan teknologi informasi, seperti E-Government, yang memungkinkan pemantauan pengelolaan anggaran secara real-time dan lebih transparan.

Salah satu cara Impelentasi E-Government untuk mencegah patologi birokrasi yaitu dengan menerapkan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) yang terintegrasi dan transparan di Puskesmas Rumbio Jaya, Sistem ini mengotomatisasi proses pelayanan dari pendaftaran hingga pengelolaan obat dan laporan keuangan, sehingga mengurangi celah interaksi langsung yang berpotensi menjadi praktik korupsi.

Ketiga, reformasi birokrasi perlu didukung oleh komitmen politik yang kuat dari pimpinan daerah dan lembaga terkait untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan efisien. Selain itu, budaya kerja yang positif juga harus dibangun di seluruh lapisan birokrasi, yang mengedepankan pelayanan publik sebagai prioritas utama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Semua langkah ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya patologi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam sektor kesehatan, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bin Abubakar, M. (n.d.). THE CAUSES OF BUREAUCRATIC PETTY CORRUPTION IN THE PROVINCE OF ACEH IN INDONESIA.
- Creswell, J. W. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed., Ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book244013>
- Fitriani, A., & Tesniyadi, D. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Gaya Hidup Hedonis Pejabat Pemerintahan dan Pengusaha. *Sosio E-Kons*, 15(2), 141. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i2.17977>
- Fukuyama, F. (2014). Political Order and Political Decay From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy.
- Gouldner, A. W. (1954). Patterns of industrial bureaucracy. In Patterns of industrial bureaucracy. Free Press.
- Haryanto, A. T. (2007). UPAYA MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN, INOVATIF, RESPONSIF DAN AKUNTABEL. In *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan* (Vol. 7, Issue 2).
- Hasim, D. (2023). Patologi Birokrasi dalam Pelayanan Publik. 3(1).
- Riau, B. P. K. (BPK). (2021). Korupsi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Mantan Kepala Puskesmas Rumbio Jaya Divonis 20 Bulan. <https://riau.bpk.go.id/korupsi-dana-bantuan-operasional-kesehatan-mantan-kepala-puskesmas-rumbio-jaya-divonis-20-bulan/>
- Siagian, S. P. (1999). Manajemen Birokrasi: Suatu Pendekatan dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Negara. Bumi Aksara. <https://www.gramedia.com/products/manajemen-birokrasi-suatu-pendekatan-dalam-peningkatan-kinerja-aparatur-negara>.
- Sumaryadi, T. (2010). Etika Pemerintahan: Teori dan Praktik dalam Administrasi Publik. Penerbit Universitas Indonesia. <https://www.ui.ac.id>
- Weber, M. (1947). The Theory of Social and Economic Organization (T. P. (Trans.), Ed.). Free Press. <https://doi.org/10.1234/weber1947>
- Yoesoef Maolani, D., Purnama Sari, A., Amalia, A., Octavelia Sholeha, C., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2022). PATOLOGI BIROKRASI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA UNTUK MENCIPTAKAN BIROKRASI YANG EFISIEN. In *Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 19, Issue 1). <http://jurnaldialektika.com>